

Optimalisasi Filantropi Pendidikan dalam Mendukung Inklusivitas MI/SD melalui Desentralisasi dan Digitalisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Muhammad Azmi Auf¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹

e-mail: mhdazmiauf001@gmail.com¹

Abstrak: Kontribusi filantropi dalam pendidikan dasar di MI/SD masih didominasi oleh pendekatan karitatif yang bersifat satu arah, namun praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran menuju model transformatif melalui sinergi komunitas, digitalisasi, dan desentralisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran filantropi dalam mendukung pendidikan inklusif, menganalisis integrasi digitalisasi dan desentralisasi dalam tata kelola pendidikan MI/SD, serta mengkaji implikasinya terhadap strategi penguatan pendidikan dasar menuju Indonesia Emas 2045. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus dokumentatif dan pendekatan partisipatif, memanfaatkan data primer dari observasi Philanthropy Festival 2025 serta data sekunder dari laporan lembaga filantropi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filantropi pendidikan inklusif berjalan optimal melalui inovasi program berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses di daerah terpencil, dan kemitraan lintas sektor yang berkelanjutan. Temuan ini menggambarkan bahwa paradigma filantropi sedang bergerak dari model karitatif menuju transformatif yang menempatkan komunitas sebagai subjek aktif pemberdayaan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif interdisipliner yang menggabungkan filantropi, digitalisasi, dan desentralisasi, serta menunjukkan efektivitas pendekatan kualitatif partisipatif dalam memahami tata kelola pendidikan inklusif secara kontekstual dan kritis.

Kata Kunci: *filantropi pendidikan, pendidikan inklusif, MI/SD, desentralisasi, digitalisasi, transformasi Pendidikan*

Abstract: *The contribution of philanthropy in elementary education at MI/SD has largely been dominated by a one-directional charitable approach, however, recent practices indicate a shift toward a transformative model through the synergy of community initiatives, digitalization, and decentralized policies. This study aims to describe the role of philanthropy in supporting inclusive education, analyze the integration of digitalization and decentralization in MI/SD governance, and examine its implications for strengthening basic education toward Indonesia Emas 2045. The study employs a qualitative approach with a documentary case study and participatory methods, using primary data from observations at the 2025 Philanthropy Festival and*

secondary data from philanthropic organization reports, policy documents, and relevant academic literature. The findings reveal that inclusive educational philanthropy operates optimally through community-based program innovation, the use of digital technology to expand access in remote areas, and sustainable cross-sector partnerships. This indicates that the philanthropic paradigm is shifting from a charitable to a transformative model that positions communities as active agents of empowerment. The study contributes to the interdisciplinary understanding of philanthropy, digitalization, and decentralization, and demonstrates the effectiveness of participatory qualitative approaches in analyzing inclusive education governance contextually and critically.

Keywords: *educational philanthropy, inclusive education, MI/SD, decentralization, digitalization, educational transformation.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif dipahami sebagai sistem yang memberikan akses belajar merata bagi semua anak tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin, kelompok rentan, maupun daerah terpencil. Pada level pendidikan dasar, khususnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD), idealisasi ini masih menghadapi berbagai kendala struktural. Data nasional menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan layanan, baik berupa keterbatasan akses di daerah 3T, minimnya pendanaan publik, maupun lemahnya infrastruktur digital (Rizki Ananda, Yuliani, Misnati, Azzikra, & Rahmadiyah, 2025). Di sisi lain, kontribusi filantropi pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola formal, sehingga masih bersifat sporadis dan terfragmentasi antaraktor (Filantropi, 2025b). Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut keberadaan sekolah dan guru, tetapi juga menuntut tata kelola sistemik yang mampu mengoptimalkan peran negara, masyarakat, dan filantropi secara bersamaan (Sazeta, Sutan, Syahrier, & Ishak, 2025).

Kajian tentang tata kelola pendidikan inklusif selama ini umumnya terbagi ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, studi yang menyoroti kebijakan pendidikan nasional, termasuk upaya negara dalam menetapkan standar inklusivitas di tingkat pendidikan dasar (Murniarti & Anastasia, 2016). Namun, sebagaimana dikemukakan Sunarto (2020), kebijakan tersebut masih cenderung terpusat dan kurang responsif terhadap kebutuhan komunitas marginal di MI/SD (Ramayani, Puspita, Kurniawaty, Hasanah, & Wismanto, 2024). Kedua, penelitian yang berfokus pada peran masyarakat sipil dan lembaga filantropi, yang biasanya mengungkap bagaimana inisiatif lokal menjangkau anak-anak dari kelompok rentan (Chairani, Yana, Ilham, & Andriani, 2024). Dalam hal ini, Harahap (2022)

menunjukkan bahwa kontribusi filantropi masih bersifat karitatif dan belum terintegrasi dalam kerangka pembangunan pendidikan dasar yang berkelanjutan (Latifah & Romadi, 2025). Ketiga, kajian tentang pemanfaatan teknologi, yang menyoroti digitalisasi sebagai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di daerah 3T (Darmawan, Aziz, & Aini, 2025). Meskipun ketiga pendekatan ini telah memberikan kontribusi penting, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji sinergi antara filantropi, desentralisasi, dan digitalisasi dalam mendukung tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD, terutama dalam perspektif manajerial dan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi sebelumnya, khususnya yang belum banyak membahas keterpaduan antara filantropi, desentralisasi, dan digitalisasi dalam konteks tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD. Secara umum, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa sinergi antarsektor tersebut merupakan dimensi substansial dalam memahami penguatan pendidikan dasar yang lebih kritis dan kontekstual. Sejalan dengan itu, terdapat tiga pertanyaan utama yang dijawab dalam tulisan ini: pertama, bagaimana peran filantropi, desentralisasi, dan digitalisasi diwujudkan dalam mendukung tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD; kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD masih direpresentasikan sebagai agenda sekunder dalam kebijakan pendidikan nasional; dan ketiga, apa implikasi dari kondisi tersebut terhadap upaya mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

Kajian mengenai pengelolaan pendidikan inklusif di tingkat dasar (MI/SD) dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045 penting dilakukan karena dapat menjelaskan mengapa kelompok rentan, seperti anak-anak penyandang disabilitas atau yang tinggal di daerah terpencil, masih sering terabaikan dalam layanan pendidikan dasar (Kusnanto, Gudiato, Silvester, Torimtubun, & Jewarut, 2025). Selama ini, kelompok tersebut kerap dipandang kurang memiliki potensi akademik bahkan jauh yang tidak sebanding dengan siswa “ideal”, sehingga mereka ditempatkan di pinggiran sistem Pendidikan (Wijaya, 2019). Paradigma lama yang melihat pendidikan hanya sebagai urusan teknis dan akademik, bukan sebagai sarana keadilan sosial, turut memperkuat pengabaian ini. Akibatnya, pendidikan inklusif di MI/SD sering dianggap kurang prioritas, atau sekadar formalitas tanpa dampak signifikan terhadap kesejahteraan peserta didik (Wijaya, 2019). Dalam konteks ini, dukungan filantropi masyarakat menjadi penting karena

mampu melengkapi keterbatasan kebijakan pemerintah, terutama melalui penyediaan sarana, beasiswa, dan layanan pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus maupun yang berasal dari keluarga prasejahtera (Fauzia, 2025). Argumen sementara ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam bagian discussion, dengan merujuk pada temuan lapangan dan perspektif teoritis yang relevan.

B. METODE

Pemilihan judul ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji peran filantropi dalam mendukung pendidikan inklusif di tingkat dasar (MI/SD), dengan menekankan keterpaduan antara desentralisasi dan digitalisasi sebagai dua dimensi penting dalam tata kelola pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang dilengkapi data sekunder dari laporan kebijakan, program filantropi pendidikan, serta praktik baik penyelenggaraan pendidikan inklusif di MI/SD. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana aktor-aktor filantropi, pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi digital dapat saling bersinergi dalam memperluas akses dan kualitas layanan pendidikan dasar. Pemilihan fokus ini bersifat *purposive* karena MI/SD dipandang sebagai fondasi krusial bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045, sekaligus karena kontribusi filantropi pada jenjang pendidikan dasar sering kali menjadi bentuk nyata dari integrasi nilai gotong royong, inovasi teknologi, dan kebijakan desentralisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dokumentatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat eksploratif serta menggali makna di balik praktik tata kelola pendidikan inklusif di tingkat MI/SD melalui peran filantropi, desentralisasi, dan digitalisasi. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui partisipasi penulis dalam acara Philanthropy Festival pada tanggal 4–8 Agustus di Jakarta, yang menjadi ruang aktualisasi gagasan, praktik, dan jejaring filantropi pendidikan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan lembaga filantropi, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur akademik yang relevan. Model studi kasus dokumentatif ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika kolaborasi multi-aktor dalam memperkuat inklusivitas pendidikan dasar, dengan validitas yang dijaga melalui triangulasi antar sumber dan penegeasan konteks analisis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi kepustakaan yang mencakup literatur akademik, kebijakan pendidikan, serta teori-teori yang relevan mengenai filantropi, desentralisasi, digitalisasi, dan pendidikan inklusif. Kedua, observasi partisipatif dalam kegiatan Filantropi Festival 2025 (4–8 Agustus, Jakarta) untuk menangkap dinamika sosial, praktik kelembagaan, serta pola interaksi antaraktor yang terkait dengan tema penelitian. Ketiga, studi dokumentasi melalui telaah arsip kegiatan, laporan lembaga filantropi, berita media, dan publikasi resmi dari berbagai organisasi. Ketiga teknik tersebut dipadukan secara triangulatif guna meningkatkan validitas dan keutuhan data.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik kualitatif-deskriptif melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yakni proses memilah, merangkum, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan rumusan masalah, khususnya terkait praktik filantropi, desentralisasi kebijakan, dan digitalisasi pendidikan inklusif. Kedua, penyajian data, dengan menyusun temuan dalam bentuk narasi tematik dan tabel klasifikasi berdasarkan kategori aktor, program, maupun strategi. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menghubungkan data yang telah disajikan dengan kerangka teoritik tata kelola, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Analisis ini bersifat interpretatif-kontekstual karena berupaya menafsirkan makna fenomena yang dikaji dalam kerangka sosial dan kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Sistemik Filantropi Pendidikan: Dari Akar Rumput hingga Kolaborasi Lintas Sektor

Temuan pertama menunjukkan bahwa praktik filantropi pendidikan inklusif di tingkat MI/SD mulai tumbuh melalui sinergi antara inisiatif masyarakat, digitalisasi layanan, dan desentralisasi kebijakan (Tanoto Foundation, 2025). Hal ini tercermin dalam dinamika Philanthropy Festival 2025 di Jakarta, di mana berbagai aktor publik, swasta, dan komunitas akar rumput berkolaborasi dalam program dan forum kebijakan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa banyak organisasi mengarahkan dukungan bagi kelompok marjinal melalui presentasi, diskusi panel, dan laporan program (Kurwiany, 2025). Pola umum yang muncul meliputi pemanfaatan teknologi untuk menjangkau wilayah terpencil, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan penekanan pada inklusivitas pendidikan dasar (Ul Haq, 2025). Temuan

ini menguatkan hipotesis awal bahwa filantropi digital dan terdesentralisasi berperan strategis dalam transformasi tata kelola pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Temuan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama yang konsisten muncul dari hasil analisis data, yaitu:

1. Inovasi program filantropi berbasis komunitas, yang menunjukkan prakarsa akar rumput dalam mendesain dan mengelola program pendidikan inklusif sesuai kebutuhan lokal.
2. Pemanfaatan teknologi digital, berupa penggunaan platform daring, aplikasi, dan sistem informasi yang memungkinkan perluasan akses serta partisipasi pendidikan, terutama di daerah terpencil.
3. Kemitraan lintas sektor, yang menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi filantropi, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan seumur hidup yang inklusif.

Ketiga aspek ini saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa optimalisasi filantropi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kombinasi kekuatan komunitas, teknologi, dan kolaborasi kelembagaan.

Aspek-aspek tersebut muncul secara konsisten dari hasil observasi partisipatif selama Filantropi Festival 2025 maupun dari dokumentasi program yang dipresentasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena yang teridentifikasi bukanlah kejadian insidental, melainkan mencerminkan pola sosial yang sistemik. Dengan kata lain, praktik filantropi pendidikan di tingkat MI/SD melalui pendekatan komunitas, digitalisasi, dan kemitraan lintas sektor telah bergerak menuju bentuk tata kelola baru yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan agenda transformasi pendidikan nasional.



Gambar 1. Sinergi Tiga Pilar Filantropi Pendidikan: Inovasi Komunitas, Teknologi Digital, dan Kemitraan Lintas-Sektor

Dari diagram tersebut terlihat bahwa transformasi sistemik filantropi pendidikan hanya dapat tercapai melalui titik temu ketiga aspek, di mana inovasi komunitas didukung teknologi digital dan diperkuat oleh kemitraan lintas-sektor yang berkelanjutan.

Fenomena yang ditemukan berlangsung dalam konteks sosial yang sarat dengan ketimpangan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi selama Filantropi Festival 2025, pengalaman inklusivitas pendidikan MI/SD terefleksikan dalam pameran program-program untuk wilayah marginal yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses, serta rendahnya literasi digital. Dalam konteks ini, sebagian besar masyarakat masih menempati posisi sebagai penerima manfaat pasif yang bergantung pada inisiatif eksternal, baik dari lembaga filantropi maupun pemerintah (Filantropi, 2025). Relasi antar faktor tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pendidikan dasar di daerah terpencil tidak dapat dipisahkan dari dinamika ketimpangan struktural dan kurangnya dukungan sistemik. Kondisi ini sekaligus membentuk persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seumur hidup serta menentukan sejauh mana mereka memandang pendidikan sebagai jalur mobilitas sosial menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Paradigma Filantropi dalam Pendidikan: Dari Karitatif Menuju Transformatif

Temuan kedua menunjukkan bahwa praktik filantropi pendidikan di Indonesia, khususnya pada level MI/SD di daerah terpencil, masih didominasi oleh pendekatan karitatif. Hal ini terlihat dalam berbagai sesi diskusi, panel, dan pameran program di Philanthropy Festival 2025, di mana sebagian besar organisasi lebih menekankan pada penyaluran bantuan langsung seperti pemberian alat tulis, beasiswa, atau renovasi fasilitas sekolah (Annette, 2025). Observasi partisipatif dan dokumentasi kegiatan mengungkap bahwa pola tersebut cenderung memosisikan penerima manfaat sebagai objek bantuan, bukan sebagai subjek transformasi (Annette, 2025). Pola pikir yang bersifat kolektif dalam ekosistem filantropi nasional ini menunjukkan relasi satu arah yang belum sepenuhnya mendukung kolaborasi multipihak maupun kemandirian komunitas. Dengan demikian, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mendorong pergeseran paradigma dari filantropi karitatif menuju filantropi transformatif, sehingga pendidikan inklusif dapat benar-benar berkelanjutan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Fauzia, 2025).

Dari data yang diperoleh, tampak adanya hubungan antara akses terhadap sumber daya pendidikan, kekuatan narasi lokal tentang bantuan, dan kapasitas kelembagaan filantropi dalam memberdayakan komunitas MI/SD (Fauzia, 2025). Interaksi antar dimensi ini membentuk konfigurasi relasi yang saling memengaruhi. Menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Algamar, meningkatnya dukungan kelembagaan dari aktor filantropi sering kali justru memperkuat pola penerimaan pasif berbasis karitas, apabila tidak disertai dengan pendekatan partisipatif dan upaya peningkatan kapasitas local (Algamar, 2025). Sebaliknya, ketika masyarakat sekolah dan orang tua murid dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan, terutama dengan dukungan mekanisme desentralisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi digital, mulai terlihat pergeseran menuju model pemberdayaan yang lebih transformatif.

Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan formal di tingkat MI/SD, hubungan antar faktor tersebut terlihat secara nyata. Berdasarkan dokumentasi program yang ditampilkan dalam Filantropi Festival 2025, bantuan pendidikan seperti beasiswa, program pelatihan keterampilan, hingga penyediaan fasilitas belajar banyak dimediasi oleh aktor lokal, antara lain tokoh agama, perangkat desa, dan relawan pendidikan dari organisasi filantropi (Purbasari, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa posisi dan relasi kekuasaan lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap cara bantuan diterima, dimaknai, dan dimanfaatkan oleh sekolah maupun masyarakat. Dengan kata lain, praktik filantropi pendidikan dasar merupakan hasil dari interaksi antara struktur sosial, preferensi budaya lokal, serta model manajerial lembaga filantropi, yang dalam beberapa kasus diperkuat melalui mekanisme desentralisasi daerah dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan layanan (Filantropi Indonesia, 2021).

Untuk memahami dinamika perkembangan filantropi pendidikan, penting untuk menelaah bagaimana praktik karitatif yang bersifat jangka pendek dapat bergerak menuju pendekatan transformatif yang berorientasi pada keberlanjutan dan perubahan sistemik. Spektrum berikut menggambarkan pergeseran tersebut secara visual.



Gambar 2. Spektrum Filantropi Pendidikan: Dari Karitatif Menuju Transformatif

Diagram ini memperlihatkan bahwa filantropi tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, melainkan terus berkembang ke arah strategi jangka panjang yang mampu mendorong keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta transformasi struktural dalam dunia pendidikan.

Pendidikan Keluarga sebagai Mekanisme Adaptif dalam Mendorong Inklusivitas MI/SD di Daerah Terpencil

Temuan ketiga menunjukkan bahwa pendidikan keluarga berperan sebagai mekanisme adaptif dalam menopang keberlanjutan pendidikan inklusif di MI/SD, khususnya di daerah terpencil (Jailani, 2014). Keterlibatan orang tua, dukungan moral dan spiritual, serta penyesuaian pola asuh menjadi wujud nyata dari peran tersebut (Mujib, 2008). Strategi ini mampu mengompensasi keterbatasan sarana prasarana formal dan sekaligus memperkuat atmosfer belajar yang ramah anak.

Strategi tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari modal sosial dan kultural keluarga. Dalam konteks masyarakat pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, strategi tersebut menjadi alat adaptif yang menjaga keberlangsungan proses belajar anak (Abdullah, 2003). Hal ini ditunjukkan, misalnya, melalui praktik pengajian keluarga yang disisipkan dengan kegiatan membaca dan menulis, atau diskusi ayah dengan anak tentang makna ilmu, yang mencerminkan adanya integrasi nilai keagamaan dengan semangat pendidikan lintas generasi. Dalam konteks ini, strategi pendidikan keluarga tidak hanya bersifat reaktif terhadap kekurangan formal, tetapi juga proaktif dalam membangun mekanisme internal berbasis nilai dan tradisi lokal.

Strategi yang dijalankan tersebut mengandung dua implikasi utama. Pertama, pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengganti sekaligus pelengkap bagi pendidikan formal yang masih terbatas di daerah terpencil, tetapi juga menciptakan resistensi kultural terhadap ketimpangan struktural. Dalam hal ini, strategi tersebut memiliki daya transformatif, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap intervensi eksternal dan memperkuat kemandirian komunitas (Safitry, 2016). Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran keluarga dapat menjadi fondasi penting dalam integrasi filantropi, desentralisasi, dan digitalisasi untuk mendukung pendidikan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 1. Mekanisme Adaptif Pendidikan Keluarga dalam Mendukung Inklusivitas MI/SD

Elemen Utama	Peran/Isi	Hubungan dengan Elemen Lain	Kontribusi pada Mekanisme Adaptif
Keluarga	Memberikan motivasi spiritual, pendampingan belajar di rumah, dan pola asuh inklusif	Terhubung dengan sekolah dan komunitas dalam menciptakan lingkungan belajar ramah anak	Menjadi aktor utama yang menopang pendidikan anak ketika akses formal terbatas
Sekolah/MI-SD	Menyediakan layanan pendidikan dasar, bekerja sama dengan keluarga dan komunitas	Bergantung pada dukungan keluarga untuk memperkuat keberhasilan program inklusif	Menjadi wadah formal yang dilengkapi dengan dukungan keluarga sehingga proses belajar lebih efektif
Komunitas Lokal	Membangun ruang belajar berbasis budaya, gotong royong, dan tradisi religious	Menjadi jembatan antara keluarga, sekolah, dan lembaga filantropi	Memberikan dukungan sosial-kultural sehingga pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal
Filantropi/ Program Eksternal	Menyediakan bantuan material, pelatihan, atau fasilitas tambahan untuk mendukung inklusivitas	Terhubung dengan sekolah dan keluarga melalui kolaborasi program	Memperkuat kapasitas lokal dan membuka peluang transformasi dari model karitatif menuju partisipatif

Secara keseluruhan, mekanisme adaptif pendidikan keluarga dalam mendukung inklusivitas MI/SD menunjukkan sinergi yang dinamis antara keluarga, sekolah, komunitas, dan program filantropi (Auf, 2025). Setiap elemen saling melengkapi, keluarga memberikan dasar motivasi dan dukungan di rumah, sekolah menyelenggarakan layanan pendidikan formal, komunitas memperkuat konteks sosial-kultural, dan filantropi memperluas akses serta kapasitas. Kolaborasi lintas elemen ini menciptakan ekosistem belajar yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi anak-anak, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses atau kebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD memperlihatkan pola inovasi yang konsisten melalui filantropi berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan lintas sector (Murodi, 2018). Tiga bukti utama partisipasi aktif masyarakat dalam program filantropi pendidikan, digitalisasi untuk memperluas akses di wilayah terpencil, dan kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan publik, swasta, dan komunitas menegaskan bahwa paradigma filantropi pendidikan sedang bergerak menuju model yang lebih sistemik dan inklusif (Suwandi & Rakuasa, 2024). Meskipun demikian, dominasi pendekatan karitatif dan keterbatasan kapasitas lokal tetap menjadi tantangan signifikan yang menuntut inovasi berkelanjutan agar pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan (Latief, 2013).

Meskipun transformasi tata kelola pendidikan inklusif di MI/SD menunjukkan inovasi melalui filantropi berbasis komunitas, digitalisasi, dan kemitraan lintas sektor, tantangan struktural masih nyata, terutama di wilayah terpencil dan marginal (Putri, 2024). Ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal yang bersifat karitatif menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya pola relasi sosial dan kekuasaan yang membuat masyarakat sering hanya menjadi penerima manfaat pasif, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan sumber daya pendidikan. Dengan demikian, model bantuan karitatif yang dominan cenderung mempertahankan kondisi saat ini, sehingga ketergantungan tetap tinggi dan kapasitas lokal untuk mendukung pendidikan inklusif secara mandiri masih terbatas.

Analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi filantropi pendidikan bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan bagian dari perubahan sistemik dalam tata kelola pendidikan inklusif MI/SD yang mengintegrasikan teknologi digital, desentralisasi, dan partisipasi komunitas secara lebih luas (Ul Haq, 2025). Temuan ini menegaskan adanya pergeseran dari model filantropi karitatif menuju model yang lebih transformatif dan berkelanjutan, di mana komunitas menjadi subjek aktif dalam pemberdayaan pendidikan. Dengan dukungan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan digitalisasi, kondisi ini berpotensi meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di wilayah terpencil dan marginal, selama kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal terus diterapkan.

Implikasi dari temuan penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif interdisipliner

yang mengintegrasikan filantropi, digitalisasi, dan desentralisasi dalam memahami tata kelola pendidikan inklusif MI/SD yang kompleks, dinamis, dan kontekstual (Umam, Ahmad, & Rochimah, 2025). Pendekatan ini memperkaya kajian pendidikan inklusif dengan menyoroti dimensi sosial-kultural, teknologi, serta dinamika kekuasaan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. Kedua, secara praktis, temuan ini memberikan dasar untuk merancang intervensi dan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang memberdayakan komunitas lokal sebagai agen perubahan dalam pendidikan inklusif. Secara khusus, kebijakan dan program yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau wilayah terpencil, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ketimpangan akses dan kualitas Pendidikan (Presiden Republik Indonesia, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah literatur dengan perspektif baru yang holistik, tetapi juga membuka ruang bagi perubahan sosial yang lebih terarah dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Suryani dan Prasetyo (2022), terdapat kesamaan utama, yaitu pentingnya peran komunitas lokal dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pendidikan inklusif di wilayah terpencil. Namun, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama pada integrasi digitalisasi dan desentralisasi sebagai elemen kunci dalam tata kelola filantropi pendidikan, yang masih jarang dibahas dalam studi sebelumnya. Komparasi ini menegaskan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan teori tata kelola pendidikan inklusif yang lebih holistik dan adaptif, sekaligus membuka perspektif baru dalam kajian manajemen filantropi dan inovasi teknologi untuk pemberdayaan pendidikan di konteks sosial-kultural yang beragam.

Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang holistik dan partisipatif sangat diperlukan, melibatkan aktor kunci seperti pemerintah daerah, lembaga filantropi, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mengatasi ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, serta dominasi pendekatan filantropi karitatif. Kebijakan ini harus mendukung integrasi teknologi digital dan desentralisasi dalam tata kelola pendidikan agar pemberdayaan komunitas dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kedua, penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali lebih dalam peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan inklusif di wilayah terpencil, terutama dengan pendekatan *mixed-methods* dan partisipatif,

sehingga pemahaman tentang fenomena ini menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam membangun strategi yang lebih inklusif, transformatif, dan berkelanjutan demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi filantropi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung inklusivitas MI/SD, khususnya melalui integrasi desentralisasi dan digitalisasi. Transformasi tata kelola filantropi yang bergerak dari model karitatif menuju model transformatif tercermin melalui inovasi program berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses, dan kemitraan lintas sektor. Temuan ini menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan komunitas lokal sebagai aktor adaptif yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, studi ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik filantropi pendidikan yang lebih sistemik, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan arahan bagi pembuat kebijakan, lembaga filantropi, dan komunitas lokal untuk merancang intervensi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan bahwa sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan filantropi dapat meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di MI/SD, khususnya di wilayah terpencil. Dengan demikian, implementasi program yang mengintegrasikan desentralisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan mendorong pergeseran paradigma filantropi dari model karitatif menuju transformatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi filantropi pendidikan melalui integrasi desentralisasi dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan inklusif di MI/SD, terutama di wilayah terpencil dan marginal. Sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga filantropi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem belajar yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang tata kelola pendidikan inklusif, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi strategi penguatan peran filantropi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I. (2003). *Pendidikan keluarga bagi anak*. Cirebon: Lektur.
- Algamar, R. (2025, August 4–8). Pendekatan partisipatif dan peningkatan kapasitas lokal dalam filantropi [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Ananda, R. R., Yuliani, C. E., Misnati, K., Azzikra, R., & Rahmadiyah, P. (2025). Analisis kesenjangan layanan pendidikan sekolah dasar antara sekolah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Annette, N. (2025, August 4–8). CSR berbasis pendidikan inklusi untuk komunitas pesisir dan 3T [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Auf, M. A. (2025). *Filantropi Islam dalam tata kelola zakat, infak, dan sedekah sebagai strategi revitalisasi hukum keluarga Islam: Kontribusi manajemen pendidikan Islam terhadap kesejahteraan keluarga*. Prosiding Hukum Keluarga Islam, 177–190. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/78>
- Chairani, S. A., Yana, J., Ilham, N., & Andriani, O. (2024). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 370–375. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.578>
- Darmawan, P. D., Aziz, M. F. R., & Aini, K. (2025). Kesenjangan akses teknologi di sekolah: Tantangan dan solusi dalam penggunaan media pembelajaran digital berbasis e-learning. *Aheen: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 1(2), 1–12.
- Fauzia, A. (2025, August 4–8). Dukungan filantropi masyarakat untuk pendidikan inklusif: Sarana, beasiswa, dan layanan pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Fauzia, A. (2025, August 4–8). Filantropi sebagai instrumen perubahan sosial [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Filantropi Indonesia. (2021). *Klaster filantropi pendidikan*. Retrieved from <https://www.filantropi.or.id>
- Filantropi, T. (2025a). *Menghubungkan filantropi untuk dampak berkelanjutan*. Retrieved from <https://filantropi.or.id/berita-nasional/members-gathering-2025/>

- Filantropi, T. (2025b). *Pendidikan berkualitas: Inisiatif filantropi di Indonesia*. Retrieved from <https://filantropi.or.id/en/national-news/pendidikan-berkualitas-filantropi/>
- Jailani, M. S. (2014). Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>
- Kurwiany, D. (2025, August 4–8). Mendorong pendidikan inklusif dan child protection dalam ekosistem SDGs [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Kusnanto, S. P., Gudiato, C., Silvester, S., Torimtubun, H., & Jewarut, S. (2025). *Resiliensi keluarga dan pendidikan anak SD: Perspektif sosial dan kultural di wilayah terpencil*. Uwais Inspirasi Indonesia. ISBN 978-623-133674-3.
- Latief, H. (2013). Filantropi dan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1).
- Latifah, T., & Romadi, P. (2025). Filantropi sosial melalui program Sekolah Nusantara Komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Riau untuk layanan pendidikan anak-anak terpencil. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 51–64. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6705>
- Mujib, A. (2008). *Ilmu pendidikan Islam* (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar: Konsep, implementasi, dan strategi. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9–18.
- Murodi. (2018). *Dakwah dan filantropi (Jalan menuju kesejahteraan umat)* (Z. Muttaqin, Ed.). Jakarta: UIN Jakarta Press. Retrieved from <https://ekonomimahasiswa.wordpress.com/2018/04/16/dakwah-bil-hal/>
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025* [Peraturan Presiden]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Purbasari, D. A. (2025, August 4–8). Pendidikan lingkungan dan transformasi kurikulum berbasis keberlanjutan [Conference presentation]. *Filantropi Festival*, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia.
- Putri, R. A. (2024, August 19). Pendidikan di wilayah terpencil: Tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved from

https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1

Ramayani, W., Puspita, S., Kurniawaty, K., Hasanah, C. S., & Wismanto, W. (2024). Penerapan kebijakan pendidikan inklusi di tingkat madrasah ibtidaiyah. *Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 26–34. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1141>

Safitry, N. A. (2016). *Konsep pendidikan Islam dalam keluarga (Studi komparasi pemikiran Abdurrahman an-Nahlawi dan Zakiah Daradjat)* (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54055/1/NURUL%20AZMI%20SAFITRY%20-%20FITK.pdf>

Sazeta, M., Sutan, A. J., Syahrier, F. A., & Ishak, I. (2025). Analisis perspektif polycentric governance pada pemerataan akses pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(2), 212–227. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.274>

Suwandi, M. A., & Rakuasa, H. (2024). Community participation in education in the digital age in Indonesia. *International Journal of Educatio Elementaria and Psychologia*, 1(5). <https://doi.org/10.70177/ijep.v1i5.1250>

Tanoto Foundation. (2025, August 11). Tanoto Foundation dorong peran filantropi untuk pendidikan di FIFest 2025. Retrieved from <https://www.tanotofoundation.org/id/>

Ul Haq, F. R. (2025, August 8). Bersinergi cerdasnegeri: Mendorong kolaborasi dan kebijakan untuk penguatan ekosistem filantropi pendidikan [Conference presentation]. *FIFest 2025*, Jakarta, Indonesia.

Umam, K., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan: Kajian konseptual dari perspektif ekonomi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 878–887. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp>